

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Di dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang dalam pengambilan sebuah keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara principal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan, dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa setiap individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal.

Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan teori agensi mengasumsikan setiap individu bertindak dengan mengutamakan kepentingannya masing-masing. Apabila kedua pihak bertindak dengan memaksimalkan utilitasnya, terdapat alasan kuat untuk memercayai bahwa manajemen sebagai agen tidak akan selalu bertindak dengan mengutamakan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, pemegang saham sebagai prinsipal harus memberikan insentif yang tepat kepada manajemen baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk meyakinkan bahwa manajemen tidak akan mengambil tindakan tertentu yang dapat merugikan prinsipal. Pemegang saham dan manajemen memiliki tujuan berbeda. Pemegang saham lebih mementingkan tingkat pengembalian keuangan atas investasi yang mereka tanamkan di perusahaan. Di sisi lain, manajer menginginkan kepentingannya dipenuhi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang memadai atas usaha pengelolaan perusahaan yang telah

dilakukannya. Perbedaan tujuan inilah yang memicu terjadinya konflik kepentingan dalam hubungan agensi.

Selain itu, manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi mengenai perusahaan dan prospeknya pada masa depan jauh lebih banyak dibanding pemegang saham. Sebagai pengelola, manajemen berkewajiban menyampaikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada prinsipal sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akan tetapi, sering kali informasi ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki manajemen dan pemegang saham disebut sebagai asimetri informasi (Anthony & Govindarajan, 2005).

Asimetri informasi memberikan kesempatan manajemen untuk bertindak oportunistis, yaitu tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi. Belkaoui (2007) menjelaskan terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu:

1. Seleksi yang Merugikan (*Adverse Selection*)

Seleksi yang merugikan (*adverse selection*) adalah jenis asimetri informasi yang timbul ketika agen menggunakan informasi yang tidak dapat diverifikasi prinsipal untuk mengimplementasikan tindakan yang berbeda dengan keinginan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal tidak dapat menentukan apakah tindakan agen merupakan pilihan yang tepat.

2. Bahaya Moral (*Moral Hazard*)

Bahaya moral (*moral hazard*) adalah suatu masalah informasi *ex-post* yang timbul ketika terdapat masalah motivasi dan konflik akibat kontrak kesepakatan pada perilaku pengganti yang tidak sempurna. Satu pihak atau lebih yang melakukan atau akan melakukan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati Tindakan-tindakan dalam penyelesaian transaksi mereka sedangkan pihak lainnya tidak. Anthony dan Govindarajan (2005) mengungkapkan terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk menangani konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, yaitu pemantauan dan kontrak insentif. Sistem pengendalian

yang memantau tindakan manajer dapat dirancang pemegang saham guna mencegah tindakan agen yang bersifat oportunistik, meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Selain itu, kontrak insentif yang sesuai juga dapat dilakukan untuk membatasi perilaku oportunistik agen.

## **2.2 Laporan Keuangan**

Ikatan Akuntansi Indonesia (2021) menyatakan laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. Sedangkan menurut Harahap (2011), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. Laporan Keuangan menurut Kieso, dkk (2008) adalah media pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak eksternal perusahaan-perusahaan yang menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasikan dalam satuan moneter. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan suatu informasi yang menjadi gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan, karena informasi yang terkandung di dalamnya menggambarkan keadaan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan

posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu pelaporan mengenai kondisi keuangan perusahaan yang harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait (Fahmi, 2013).

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi memuat informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan berbagai sumber daya yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mereka. Laporan keuangan digunakan oleh para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, serta lembaga-lembaga, dan masyarakat (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021).

Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda seperti sebagai berikut:

1. Investor

Dalam penanaman modal ke sebuah perusahaan, investor menghadapi berbagai risiko dan penasihat investor juga berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan sehingga mereka membutuhkan informasi guna membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan membayar dividen.

## 2. Karyawan

Karyawan maupun kelompok perwakilannya membutuhkan informasi mengenai profitabilitas dan stabilitas perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

## 3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman memerlukan informasi keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar pinjaman serta bunganya pada saat jatuh tempo.

## 4. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya memerlukan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah kewajiban akan dibayar pada saat jatuh tempo. Dibanding pemberi pinjaman, kreditur usaha memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang lebih pendek kecuali apabila perusahaan sebagai pelanggan utama sehingga mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

## 5. Pelanggan

Pelanggan membutuhkan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila mereka memiliki perjanjian jangka panjang atau memiliki kebergantungan yang tinggi terhadap perusahaan.

## 6. Pemerintah

Pemerintah berkepentingan atas informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

## 7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara, misal pemberian kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian nasional sehingga laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

### 2.3 Integritas Laporan Keuangan

Menurut Mayangsari dalam (Fajaryani, 2015) menjelaskan bahwa Integritas laporan keuangan adalah sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur sehingga tidak menyesatkan pengguna ketika akan membuat sebuah keputusan. Integritas laporan keuangan merupakan salah satu produk dari standar etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan informasi (laporan keuangan) yang secara formal wajib dipublikasikan dengan benar sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik (Aljufri, 2014).

Menurut Yulinda (2016), Integritas laporan keuangan merupakan sejauh mana laporan keuangan disajikan secara benar dan jujur, dimana semua informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan arus kas harus benar apa adanya karena akan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan. Integritas laporan keuangan diukur dengan konservatisme. Watts (2003), mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui utang dan kerugian yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Tingkat konservatisme dalam laporan keuangan dimana nilai aset *understatement* dan kewajiban *overstatement* dapat diketahui dengan menggunakan *market to book ratio*.

Menurut Beaver dan Ryan (2000), Menyatakan *Market to book ratio* adalah kecenderungan nilai buku lebih rendah dari nilai pasar. Jika rasio nilai menunjukkan lebih dari 1, menunjukkan penerapan konservatisme karena pencatatan nilai buku lebih rendah dari nilai pasar oleh perusahaan. Nilai rasio harga pasar saham dibandingkan dengan nilai buku menggambarkan respon pemegang saham terhadap entitas, artinya pemegang saham akan membayar saham lebih tinggi dari nilai buku. Jika perusahaan

memiliki harga pasar saham yang lebih tinggi, maka akan mencerminkan laporan keuangan yang baik. Kriteria untuk menentukan integritas laporan keuangan adalah: Jika nilai ILK  $< 1$  berarti rendah. Artinya integritas laporan keuangan perusahaan masih rendah. Jika nilai ILK  $> 1$  berarti tinggi. Artinya integritas laporan keuangan pada perusahaan tersebut baik karena nilainya lebih besar dari satu.

Menurut Smith, Ren, dan Dong (2011) dalam (Indrasari et al., 2016) pengukuran integritas laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan konservatisme. Perusahaan yang mengalami kegagalan, cenderung melakukan manipulasi data akuntansi dengan menerapkan praktik yang tidak konservatif. Interpretasi umum dari konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak *overstated* dan kewajiban atau beban tidak *understated* (Saksakotama & Cahyonowati, 2014). Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu, *Financial Distress*, *Corporate Governance*, Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Intellectual Capital*.

#### **2.4 *Financial Distress***

Definisi *financial distress* menurut Yustika (2015) adalah kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. *Financial distress* memiliki hubungan yang erat dengan kebangkrutan pada suatu perusahaan, karena *financial distress* adalah tahap dimana kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan. Sedangkan menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013), *financial distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Jika perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka akan sangat memungkinkan perusahaan

tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (*financial distress*), dan jika kondisi tersebut tidak cepat diatasi maka ini bisa berakibat kebangkrutan usaha.

Menurut Saleh dan Sudiyatno (2013), faktor-faktor yang dapat menyebabkan probabilitas kebangkrutan atau sering disebut *financial distress*, antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, tertinggal dalam teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, dan kelemahan manajemen perusahaan.

Teori akuntansi positif menyebutkan bahwa manajer akan cenderung mengurangi tingkat konservatisme akuntansi apabila perusahaan mengalami tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) yang tinggi karena apabila terjadi *financial distress* mengindikasikan kinerja buruk manajemen dan akan mengakibatkan pergantian manajemen. Oleh karena itu manajer akan mengurangi tingkat konservatisme (Noviantari & Ratnadi, 2015).

Konservatisme akuntansi mengindikasikan adanya integritas laporan keuangan karena perusahaan yang mengalami kegagalan, cenderung melakukan manipulasi data akuntansi dengan menerapkan praktik yang tidak konservatif, sehingga konservatisme dirasa lebih sesuai untuk menjadi proksi integritas laporan keuangan dibandingkan proksi lainnya seperti halnya manajemen laba (Smith, dkk dalam Saksakotama & Cahyonowati, 2014). Pernyataan ini didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suryanawa (2014), Fathurahmi, dkk (2015), dan Noviantari & Ratnadi (2015) menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

Darsono dan Ashari (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang dijadikan panduan untuk menilai kesulitan keuangan (*financial distress*) yang akan diderita perusahaan, pengukuran tersebut antara lain:

1. Informasi arus kas sekarang dan arus kas untuk periode mendatang. Arus kas memberikan gambaran sumber-sumber dan penggunaan kas perusahaan.
2. Analisis posisi dan strategi perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Informasi ini memberikan gambaran posisi perusahaan dalam persaingan bisnis yang merujuk pada kemampuan perusahaan dalam menjual produk atau jasanya untuk menghasilkan kas.
3. Penilaian kebangkrutan perusahaan adalah suatu formula yang dicetuskan oleh Edward Altman yang disebut dengan rumus Altman *Z-score*.

Model *financial distress* diskriminan Altman (*Z-Score*) dinyatakan oleh Supardi (2003) adalah suatu model statistik yang dikembangkan oleh Altman yang kemudian berhasil merumuskan rasio-rasio *financial* terbaik dalam memprediksi terjadinya kebangkrutan perusahaan.

### **2.5 Corporate Governance**

*Corporate governance* adalah suatu hal yang dianggap sangat penting (Astanti, 2015). Pertama, *corporate governance* adalah sebuah kunci atas keberhasilan suatu perusahaan untuk bertumbuh serta menghasilkan laba dalam waktu yang panjang serta mencapai keberhasilan atas rivalitas bisnis global khususnya untuk perusahaan berkembang sekaligus menjadi *go public*. Kedua, terkait dengan krisis ekonomi di benua Asia dan Amerika yang diyakini sebagai akibat dari gagalnya penggunaan *Corporate Governance*. Menurut Astanti (2015) memaparkan bahwa penyebab dari sistem hukum yang kurang baik, standarisasi akuntansi dan audit yang berjalan tidak stabil, lemahnya aktivitas perbankan, dan pandangan *Board of Directors* (BOD) yang tidak peduli terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas. Hal tersebut menjelaskan untuk membentuk sebuah lingkungan keuangan yang sehat sangat diperlukan *corporate governance* yang baik.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Per-01/MBU/2011 berkaitan penerapan praktik *corporate governance* pada BUMN menjelaskan *corporate governance* sebagai pola yang diterapkan oleh organisasi BUMN demi memaksimalkan kesuksesan bisnis dan tanggung jawab perusahaan untuk mencapai *shareholders* dalam waktu yang panjang dengan memperdulikan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya, dengan berpedoman pada aturan dan norma-norma yang berlaku. Perlu ditetapkan landasan atau aturan yang menjadi pedoman atau prinsip dalam penafsiran konsep *corporate governance* perusahaan yang baik sebagai konsep mekanisme perusahaan yang efektif (Astanti, 2015). Prinsip-prinsip atau pedoman tersebut menjadi ujian atas berhasilnya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan. Diperlukan suatu alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai atas penerapan *corporate governance* tersebut.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* menjelaskan tentang asas *corporate governance* yang diterapkan pada bisnis dan jajaran perusahaan sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi material dan penting yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan diharuskan mampu bertanggungjawab atas kinerjanya dengan transparansi serta wajar.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang dan diakui sebagai good corporate citizen, perusahaan harus mematuhi hukum, peraturan dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*)

Setiap organisasi perusahaan baru dikelola secara independen sehingga tidak saling mendominasi dan tidak memungkinkan adanya campur tangan dari pihak lain.

## 5. Kewajaran. dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan wajib selalu memperdulikan kepentingan shareholders dan stakeholders berlandaskan prinsip kewajaran dan keadilan.

Penerapan *corporate governance* membutuhkan berbagai pihak pada penerapannya. Pada mekanisme ini setiap jajaran perusahaan mengemban hak, kewajiban serta tugasnya yang saling berhubungan. Penerapan *corporate governance* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu (Permatasari et al., 2019) menekankan pada keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit pada sebuah perusahaan. karena dalam menghasilkan integritas laporan keuangan membutuhkan adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris independen dan komite audit (Indrasari et al., 2016).

### **2.5.1 Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017 menjelaskan “dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu perusahaan efek wajib memiliki dewan komisaris independen. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris”. Dewan Komisaris memiliki kendali yang sangat krusial dalam perusahaan, khususnya pada penerapan *Corporate Governance* yang bertugas untuk mengklaim pelaksanaan taktik perusahaan, memantau manajemen pada saat menjalankan perusahaan (Yulinda et al., 2016).

Dewan komisaris independen adalah jajaran terbaik untuk melancarkan fungsi monitoring untuk terwujudnya entitas dengan *corporate governance* (Akram et al., 2018). Dewan komisaris independen. didalam perusahaan dapat menyetarakan saat pengambilan keputusan terutama untuk upaya melindungi pemegang saham minoritas dan pihak yang berhubungan lainnya (Sukanto & Widaryanti, 2018). Masuknya dewan komisaris independen mampu untuk memajukan efektivitas dewan tersebut untuk mengontrol manajemen dalam mengatasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan.

Dewan komisaris independen diwajibkan mempunyai integritas serta independensi yang tinggi agar sulit untuk terpengaruh dari manajemen dan kinerja pengawasan dapat dijalankan secara efektif dan efisien (Nurdiniah & Pradika, 2017). Melalui dewan komisaris yang independen, laporan keuangan yang tersaji diharapkan berintegritas tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menyesatkan pengguna pada saat mengambil keputusan (Nurdiniah & Pradika, 2017). Disimpulkan dewan komisaris independen adalah struktur perusahaan yang anggotanya independen, komisaris non-korporat yang bertugas memastikan implementasi strategi, mengawasi, dan mengarahkan perusahaan.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengeluarkan peraturan Nomor IX.I.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/ PM/2004, yang kini diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa direksi minimal terdapat 2 anggota, salah satunya yaitu dewan komisaris independen. Adanya direksi independen pada dewan komisaris diharapkan dapat mengatasi tindakan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga dihasilkan laporan keuangan yang berintegritas (Nurdiniah & Pradika, 2017).

### **2.5.2 Komite Audit**

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendeskripsikan bahwa komite audit yaitu badan kerja profesional serta independen yang dipilih dewan komisaris. Komite audit mendukung dan menguatkan fungsi dewan pengawas dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dalam tahapan akuntansi, manajemen masalah, tugas audit serta penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan. Komite Audit merupakan auditor internal yang pilih oleh dewan komisaris, yang ditugaskan memantau dan mengevaluasi perancangan dan pelaksanaan dalam mengendalikan internal perusahaan (Thesarani, 2017).

Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan oleh manajemen. Pembentukan komite audit pada struktur perusahaan bertujuan untuk meminimalisir kecurangan pada saat penyajian informasi akuntansi sehingga dapat menaikan integritas pada laporan keuangan. Komite audit dipimpin oleh salah satu dewan komisaris independen. Komite audit setidaknya didirikan dengan 3 anggota yang berasal dari pihak diluar perusahaan publik.

Sehubungan dengan pelaporan keuangan, tugas dari komite audit adalah untuk memantau dan memeriksa atas laporan keuangan dan meyakinkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, pemeriksaan kembali laporan keuangan untuk kepatuhan standar dan pedoman tersebut dan sudahkah mematuhi informasi lain yang diketahui komite audit, serta penilaian kualitas layanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. Salah satu fungsi dibentuknya komite audit yaitu untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap berintegritas (Sukanto & Widaryanti, 2018). Artinya laporan keuangan yang disusun tidak menyimpang dan sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu memiliki komite audit yang efektif pada perusahaan berharap dapat memberikan dampak yang positif terhadap kualitas dan integritas laporan. keuangan yang dihasilkan.

Pendirian komite audit dan dewan komisaris independen telah ditetapkan dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Bapepam, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 Peraturan tentang Pencatatan Efek Nomor I-A yang mengatur adanya dewan komisaris independen, komite audit, memastikan peranan aktif Sekretaris 24 Perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya serta berkewajiban untuk mengungkapkan informasi dan mewajibkan emiten untuk memberikan informasi penting dan relevan.
2. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/PM/2000 yang menyatakan bahwa setiap emiten harus memiliki komite audit.
3. Surat Edaran Ketua bapepam-LK tentang pembentukan dan pelaksanaan instruksi kerja komite audit dalam peraturan Nomor SE-07/PM/2004. Pembentukan komite audit bertujuan untuk menjaga independensi auditor. Sesuai dengan kegiatan komite audit tersebut, keberadaan komite audit di perusahaan dapat berdampak terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang disusun.

### ***2.6 Intellectual Capital***

*Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD,1999), menjelaskan IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak berwujud: (1) *organisational (structural) capital*; dan (2) *human capital*. (William, 2001) mendefinisikan *Intellectual Capital* sebagai informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai. Investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual rendah.

Beberapa kerangka konseptual dapat digunakan untuk mengelompokkan dan melaporkan Intellectual Capital. Sveiby (1997) dalam (Cerbioni & Parbonetti, 2007)

menawarkan sebuah kerangka yang membagi Intellectual Capital ke dalam 3 kelompok yaitu:

1. *Human Capital* (Modal Manusia) merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, ketrampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan.
2. *Structural Capital* (Modal Struktural) merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk Intellectual Property yang dimiliki perusahaan.
3. *Capital Employee* merupakan pengukuran yang menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Bani Saad & Aisyah Faraschya Abdillah (2019)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Audit Tenure, Dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan keuangan	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Leverage, Audit Tenure, Financial Distress  Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan <i>financial distress</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan <i>leverage</i> dan <i>audit tenure</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
2.	Sri Ayem & Dewi Yuliana (2019)	Pengaruh Independensi Auditor, Kualitas Audit, Manajemen Laba, Dan Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Independensi Auditor, Kualitas Audit, Manajemen Laba, Dan Komisaris Independen  Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan	Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen mempengaruhi integritas keuangan secara positif.

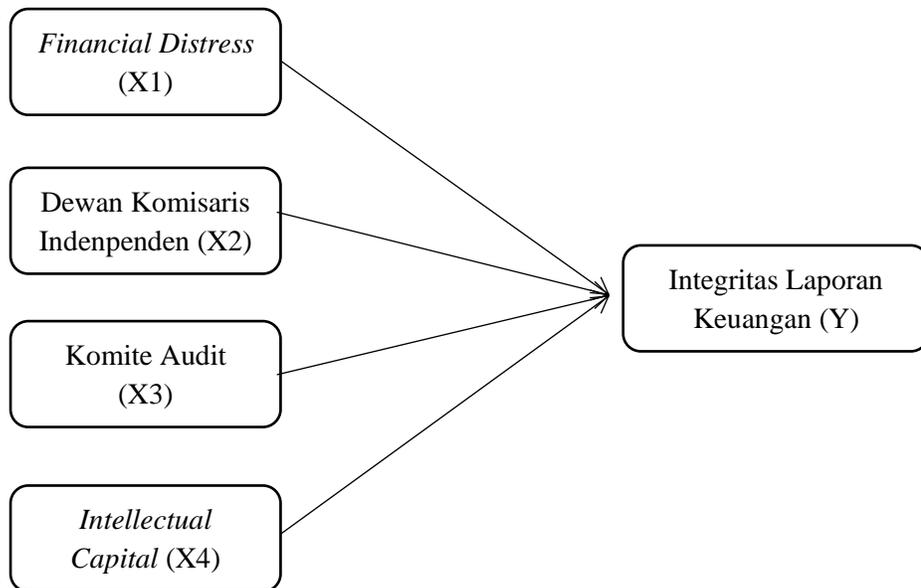
3.	Annisa Nurbaiti, Tri Utami Lestari, Nabilah Alyani Thayeb (2021)	Pengaruh Corporate Governance, Financial Distress Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan	<p>Variabel independen: Corporate Governance, Financial Distress, Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan secara parsial, ada pengaruh negatif pada ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.</p>
4.	Liliany & Arisman (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Dan Financial Distress</p> <p>Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan financial distress berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p>
5.	Kusuma Indawati Halim (2021)	Pengaruh Financial Distress, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan	<p>Variabel Independen: Financial Distress, Komite Audit, Dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p>	<p>Hasil statistik dari pengujian data menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan</p>

				berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
6.	Inri Verel Pradita Palebangan & Majidah (2021)	Pengaruh Intellectual Capital, Leverage Dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Intellectual Capital, Leverage Dan Audit Tenure  Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa <i>intellectual capital</i> , <i>leverage</i> dan <i>audit tenure</i> berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan. Secara parsial <i>intellectual capital</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan <i>audit tenure</i> tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
7.	Oky Eka Putra, Mentari Dwi Aristi, Zul Azmi (2022)	Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit  Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan	Hasil membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif, ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen

				dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
8.	Difa Raiza Herlambang & Annisa Nurbaiti (2023)	Pengaruh Intellectual Capital, Komite Audit, Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Intellectual Capital, Komite Audit, Komisaris Independen  Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan	Hasil pemeriksaan parsial komite dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan modal intelektual berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
9.	Luthfiah Fathin & Abubakar Arif (2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, Intellectual Capital, Financial Distress, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, Intellectual Capital, Financial Distress, Kualitas Audit  Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan	Hasilnya memperlihatkan ukuran perusahaan dan kualitas audit memberi pengaruh positif pada integritas laporan keuangan, sedangkan financial distress dan audit tenure memberi pengaruh negatif pada integritas laporan keuangan. Serta intellectual capital tidak memberi pengaruh pada integritas laporan keuangan.

## 2.8 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka pemikiran yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## 2.9 Hipotesis

### 1. Pengaruh *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan

*Financial distress* adalah sebuah situasi arus kas yang bermasalah didalam perusahaan yang diartikan sebagai pertanda dari menurunnya kinerja perusahaan yang biasanya berdampak pada kebangkrutan (Nurbaiti et al., 2021). Ketika sebuah perusahaan mulai mengalami kesulitan keuangan. Manajer akan menghindari praktik manajemen laba, dikarenakan manajer telah kehabisan cara dan metode manajemen laba dalam menjalankan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Ario et al., 2020). Berdasarkan teori sinyal perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dengan prospek yang buruk akan berupaya untuk memberikan sinyal yang

lebih baik kepada publik melalui penyelenggaraan akuntansi yang konservatif dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut. Akibatnya, integritas laporan keuangan perusahaan tersebut pun akan mengalami penurunan (Saad & Abdillah, 2019). Setiap perusahaan berkewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya secara andal dan relevan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah diatur di dalam PSAK No.1 sehingga walaupun perusahaan sedang menghadapi kondisi *financial distress*, perusahaan tetap dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai peraturan (Nurbaiti et al., 2021).

Penelitian Ario et al., (2020) menyatakan *financial distress* mempengaruhi integritas laporan keuangan secara positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Haq et al., (2017) yang menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan hipotesis penelitian ini:

**H1: *Financial Distress* berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan**

2. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan  
Dewan komisaris independen diharuskan mempunyai integritas dan independensi yang tinggi agar sulit terpengaruh manajemen dan pelayanan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Nurdiniah & Pradika, 2017). Dalam teori keagenan, keuntungan dari memiliki dewan komisaris independen adalah meningkatkan pengungkapan hasil manajemen untuk mengurangi perilaku berhubungan kepentingan pribadi manajemen (Dewi & Putra, 2016). Jika suatu perusahaan terdapat dewan komisaris independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen mungkin lebih dapat diandalkan, karena dewan komisaris ini bertanggungjawab untuk memantau dan memberi perlindungan hak-hak di luar perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen diasumsikan laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen mampu dipertanggungjawabkan keandalannya bagi pemakai dalam mengambil keputusan dengan tepat (Nurdiniah & Pradika, 2017).

Penelitian Nurdiniah & Pradika (2017) mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berdampak terhadap integritas laporan keuangan secara positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Ayem & Yuliana (2019), Dewi & Putra (2016) dan Indrasari et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen mempengaruhi integritas laporan keuangan secara positif. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini:

**H2: Dewan Komisaris Independen akan mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan**

3. Pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan keagenan merupakan korelasi kontraktual antara prinsipal dengan agen untuk memberi pelayanan menggunakan nama prinsipal dan memungkinkan agen menghasilkan keputusan terbaik untuk direktur. Penting bagi manajer untuk memiliki supervisor independen di perusahaan untuk membuat keputusan terbaik dan mengurangi risiko asimetri informasi Dewi & Putra (2016). Berdasarkan surat keputusan BAPEPAM, seluruh perusahaan terbuka diwajibkan memiliki komite audit. Kehadiran komite audit pada perusahaan diharapkan dapat menjadi metode untuk meminimalisir dan mengatasi tindakan oportunistik, serta mendorong manajemen untuk melancarkan kecurangan pada penyajian laporan keuangan. Independensi komite audit wajib tinggi agar dapat secara efektif mengendalikan manajemen dan memastikan bahwa kegiatan operasi perusahaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan (Nurdiniah & Pradika, 2017). Sehingga dapat memastikan bahwa integritas laporan keuangan yang disediakan manajemen tidak menyesatkan pengguna.

Penelitian Halim (2021) dan Awalina et al., (2020) menemukan bahwa komite audit mempengaruhi integritas laporan keuangan secara positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Awalina et al., (2020) yang mengungkapkan komite audit mempengaruhi

terhadap integritas laporan. Keuangan secara positif. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini:

**H3: Komite Audit akan mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan**

4. Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

*Intellectual capital* sangat penting untuk praktekkan agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas manusia yang akan mempunyai dampak pada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan (Wardani, 2016). Didasarkan pada Aset pengetahuan, yang meliputi modal intelektual, ialah jenis lain dari aset tidak berwujud yang sering dimiliki bisnis. Modal intelektual, seperti yang diterangkan oleh Weqar & Haque (dikutip dalam Suzan & Aini, 2022), ialah aset pengetahuan yang dimiliki oleh setiap organisasi yang bila diawasi dengan baik akan menciptakan nilai bagi bisnis tersebut.

Riset yang dilakukan oleh Palebangan dan Majidah (2021) menerangkan *intellectual capital* ada pengaruhnya positif kepada integritas laporan keuangan. *Intellectual capital* dipakai untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan kejujuran, menginformasikan keadaan perusahaan yang sebenar-benarnya, alhasil tidak menyesatkan pengguna dalam memperoleh informasi perusahaan. Dengan berperilaku jujur maka akan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Sidik et al. (2023), menemukan bahwasanya *intellectual capital* berdampak positif kepada Integritas laporan keuangan.

**H4: *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan**